

KUTAI TIMUR 20 26 *Dalam* S E P E K A N



Festival Lomplai 2026 Capai Puncak, Tradisi Dayak Wehea Kian Mendunia

Kutim Dorong Hilirisasi
Sawit, Bupati Ajak Investor
Bangun Industri di KEK
Maloy

Kutai Timur Tuan Rumah Rakorda
Kominfo Kaltim 2027, Siap Perkuat
Integrasi Digital

Erau Kutai Siap Digelar di
Kutim Tahun Ini, Bupati Ard-
iansyah Tegaskan Komitmen
Pelestarian Budaya



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



Selengkapnya
Kutaitimurkab.go.id

Edisi April 2026
Minggu Ketiga

kominfo.kutim

Jambore Jarwasnaba 2026, Wadah Edukasi dan Aksi Remaja Lawan Narkoba di Kutim

Sanggatta - 16 April 2026

Program strategis nasional Optimalisasi Lahan (Oplah menjadi bagian penting dalam mensukseskan ketahanan pangan nasional yang digagas pemerintah Pusat

Seluruh daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut. Tidak terkecuali Kabupaten Kutai Timur.

Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang besar untuk ikut terlibat secara langsung dalam mensukseskan ketahanan pangan nasional.

"Kita baru mengusulkan empat titik, dari 10 titik yang diminta oleh Pemerintah Pusat. Namun kami akan terus berupaya mewujudkan itu agar peluang swasembada pangan ini dapat dimaksimalkan," Ujar Wabup Mahyunadi usai menggelar rapat bersama Direktur Irigasi Pertanian, di Ruang Arau Sekretariat Daerah Kutim, Kamis (16/04/2026).

Selain itu, dirinya juga menyebut, saat ini Pemerintah Daerah juga tengah melaksanakan program perluasan lahan pertanian dengan menargetkan seluas 20 ribu hektare. Dirinya juga tidak menampilkan bahwa dalam mewujudkan program tersebut bukan tanpa halangan.

Saat ini menurutnya, masih ada tantangan yang cukup krusial. Terutama terkait masih rendahnya minat masyarakat untuk bertani (menanam padi). Salah satu penyebabnya yakni kurangnya fasilitas pendukung pertanian yang belum memadai.

Namun halangan tersebut, menurut orang nomor dua di Kutim ini tidak boleh menjadi alasan dalam mendorong dan mengupayakan agar masyarakat bisa kembali melirik sektor vital (pertanian) ini yang juga memiliki potensi ekonomi tinggi serta berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Untuk itu, dirinya menegaskan pemerintah Daerah akan terus berupaya memberikan atensi dan dukungan dengan berbagai kebijakan untuk mendukung dan mensukseskan program Ketahanan pangan nasional.

"Hadirnya perwakilan dari pusat ini (tim Direktorat Irigasi) menjadi sinyal positif dan saya yakin akan mampu mengubah sudut pandang petani kita, dimana sektor pertanian juga bisa memberikan nilai ekonomi yang menjanjikan," pungkasnya.

Direktur Irigasi Pertanian, Liferdi Lukman, menilai Kutai Timur memiliki potensi sumber air yang melimpah untuk menjadi sentra produksi beras. Ia menekankan bahwa pihaknya berkomitmen dalam memastikan ketersediaan air tersebut dapat terdistribusi ke lahan-lahan pertanian secara optimal.





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Semangat Pagi di Bukit Pelangi, Diskominfo Staper dan DWP Kutim Gelar Senam Bersama

Sangatta - 17 April 2026

Suasana penuh semangat terlihat saat jajaran Diskominfo Staper senam bersama dengan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Timur di halaman Kantor yang beralamat di jalan Prof Dr Sudiatmo Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Jum'at (17/04/2026) pagi.

Ketua DWP Kutim Ny Lisnawaty Rizali Hadi, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H Siburian bersama Sekretaris Rasyid dan jajaran Kepala Bidang serta seluruh peserta terlihat antusias mengikuti ritme gerakan yang cukup ringan namun penuh dengan semangat kebersamaan dan keceriaan.

Setiap gerakan yang dilakukan tidak hanya menjadi aktivitas fisik semata, tetapi juga menghadirkan suasana hangat yang mempererat hubungan antar pegawai dan pengurus organisasi istri para ASN di lingkup Pemkab Kutim ini. Senyum dan tawa pun menghiasi sepanjang kegiatan, mencerminkan energi positif yang terpancar dari seluruh yang terlibat.

Ny. Lisnawaty Rizali Hadi, menjelaskan bahwa agenda ini adalah bagian dari program kerja rutin DWP yang dilaksanakan secara jemput bola ke setiap Perangkat Daerah (SKPD), dengan tujuan utama yakni menjaga kesehatan dan tali silaturahmi

Dirinya berharap melalui kegiatan senam bersama ini, tidak hanya mampu memberikan dampak terhadap kesehatan namun juga mampu menumbuhkan rasa kebersamaan, meningkatkan kekompakan seluruh jajaran pegawai terutama di instansi yang identik dengan warna biru ini

Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Ronny Bonar H Siburian menyebut bahwa kegiatan senam bersama menjadi salah satu upaya sederhana namun efektif dalam menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

melalui kegiatan rutin seperti ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat sinergi antar pegawai, serta menciptakan suasana kerja yang lebih sehat, harmonis, dan penuh energi positif



"Pelaksanaan di Diskominfo Staper ini adalah bagian dari sepuluh dinas yang akan kita sasar".

Ny. Lisnawaty Rizali Hadi
Ketua DWP Kutai Timur



Mahyunadi: Lingkungan Bersih dan Asri Kunci Masyarakat Sejahtera dan Bahagia

Sangatta - 17 April 2026

Jumat Bersih di RT 22 Desa Persiapan Teluk Rawa, Kecamatan Sangatta Utara, berlangsung penuh antusias. Warga berbondong-bondong mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan sekitar sekaligus berpartisipasi dalam penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, Jumat (17/04/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.30 WITA itu juga bertambah spesial karena turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur (Wabub Kutim), Mahyunadi yang juga turut ambil bagian dalam kegiatan yang dirangkai dengan penanaman pohon bersama jajaran Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan perusahaan.

Wabub Mahyunadi menegaskan bahwa kehadiran perusahaan di wilayah pertambangan harus diiringi dengan kontribusi nyata bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga keseimbangan lingkungan, salah satunya yang dilakukan saat ini yakni menanam pohon dilingkungan pemukiman warga sekitar perusahaan.

Mahyunadi juga menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, tetapi juga dari aspek kebahagiaan. Menurutnya, lingkungan yang bersih, asri, serta tersedianya ruang publik yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang bahagia.

"Kita ingin masyarakat tidak hanya sejahtera, tetapi juga bahagia. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah, serta membuka ruang-ruang interaksi sosial," ujar Mahyunadi.

Orang nomor dua di Kutim itu juga mendorong agar kegiatan Jumat Bersih terus dikembangkan di seluruh RT, tidak hanya di Kecamatan Sangatta Utara, tetapi juga di gencarkan di seluruh wilayah lain di Kutai Timur.

Sementara itu, Camat Sangatta Utara, Hasdiyah, menyampaikan kegiatan Jumat Bersih menjadi rutinitas yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Dirinya menyebut program ini kini selaras dengan program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yakni gerakan lingkungan ASRI.



"Kegiatan ini bukan hanya kerja bakti, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus melihat langsung permasalahan di lapangan, seperti drainase dan infrastruktur lingkungan," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Pejabat Kepala Desa Persiapan Teluk Rawa, Durahman, mengungkapkan bahwa kegiatan Jumat Bersih di wilayahnya turut dikombinasikan dengan penanaman tanaman buah lokal sebagai upaya penghijauan dan pemberdayaan masyarakat.



Ardiansyah Sulaiman: Karang Taruna Harus Jadi Penggerak Kreativitas Pemuda Kutim

Sangatta - 19 April 2026

Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, kukuhkan 130 jajaran pengurus Karang Taruna Kabupaten periode 2025-2030 di ruang Meranti Sekretariat Daerah, Bukit Pelangi kawasan pemerintahan Sangatta, Minggu (19/04/2026).

Usai pengukuhan, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan keberadaan Karang Taruna merupakan bagian dari pilar strategis dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dalam mengawal program pemerintah, terutama dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Khususnya yang tersebar di 18 kecamatan.

Dirinya mengaku menaruh harapan kepada para pengurus yang baru dilantik, tidak hanya menjadi simbol organisasi tetapi aktif bergerak sebagai motor penggerak kreativitas di masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan juga akan mempercepat pemerataan pembangunan, terutama dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat desa.

"Saya melihat banyak kontribusi yang sudah mereka siapkan untuk daerah, maka dari itu kesempatan ini jangan sampai disia-siakan," Ujar Bupati Ardiansyah kepada awak media usai kegiatan.



Sebelumnya, dalam sambutannya. Ketua Karang Taruna Kutim, Arsyl Dyago Tandi Tasik, menyampaikan kesiapan jajarannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah maupun organisasi mitra seperti KNPI. Selain itu juga menegaskan bahwa ke depan, Karang Taruna akan lebih proaktif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, baik yang berada di pusat kota maupun di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.

Lebih lanjut. Arsyl juga membeberkan sejumlah agenda krusial yang akan menjadi fokus utama kepengurusannya, termasuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait penataan lingkungan sosial. Ia berkomitmen untuk membawa Karang Taruna menjadi wadah bagi pemuda untuk berperan aktif dalam sektor produktif seperti pertanian dan pelestarian budaya lokal.





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Kutim Dorong Hilirisasi Sawit, Bupati Ajak Investor Bangun Industri di KEK Maloy

Sanggata - 20 April 2026

Bupati Kutai Timur menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi ekonomi, dari daerah penghasil bahan baku menjadi pusat industri berbasis produk turunan, khususnya komoditas kelapa sawit. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menempatkan sawit sebagai komoditas strategis nasional dalam mendukung ketahanan energi.

Menurutnya, perubahan paradigma tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, keterlibatan aktif perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kutai Timur dinilai sangat krusial.

“Perusahaan tidak hanya berorientasi pada produksi bahan mentah, tetapi juga diharapkan berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah melalui hilirisasi industri sawit yang berkelanjutan,” ujarnya. Senin (20/04/2026)

Lebih lanjut, pemerintah telah menyiapkan fondasi kuat dengan menghadirkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai pusat pengembangan industri. Kawasan ini dinilai strategis karena didukung akses logistik yang efisien, termasuk berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi lintasan perdagangan internasional.

Bupati pun mendorong adanya langkah konkret dari para pemangku kepentingan, termasuk legislatif, untuk mempercepat realisasi investasi di sektor ini. Ia berharap perusahaan-perusahaan perkebunan dapat segera membangun fasilitas pengolahan seperti kilang minyak (refinery) hingga pabrik biodiesel di KEK Maloy.

“Ini bukan hanya peluang bisnis, tetapi juga bagian dari kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi investor yang ingin tumbuh bersama Kutai Timur,” tegasnya.

Ia juga mengajak para investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk melihat Kutai Timur sebagai kawasan potensial dengan sumber daya melimpah, dukungan kebijakan pemerintah, serta infrastruktur yang terus berkembang. Investasi di sektor hilirisasi sawit dinilai mampu memberikan keuntungan jangka panjang sekaligus dampak sosial yang besar.

“Dengan hadirnya industri pengolahan di daerah, kita bisa menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing produk, dan yang terpenting menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Ini adalah masa depan Kutai Timur yang kita bangun bersama,” pungkasnya.



Kutim Didorong Perbaiki Tata Kelola, KPK Targetkan Peningkatan Nilai SPI dan MCP

Sangatta - 22 April 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah. Salah satunya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan melakukan Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama seluruh Perangkat Daerah se Kutim, Rabu (22/5/2026) di Ruang Meranti.

Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi dan upaya Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026 serta evaluasi Pengamanan Aset Pemkab Kutim.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Andy Purwana mengatakan, kehadirannya beserta tim menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi yang sudah dicapai oleh Pemkab Kutim.

"Sebelum kesini kami sempat bertemu Pak Bupati, kami sampaikan terkait Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kutim. Untuk itu kedepannya Pak Bupati akan rutin melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terkait MSCP nya KPK," tutur Andy

Pada kesempatan itu, dirinya mengatakan skor SPI Kutim di tahun 2024 adalah 59,16 dan di tahun 2025 di angka 66,36 termasuk kategori rentan. Sementara, capaian MSCP Kutim tahun 2025 berada di angka 53,19 dan di tahun 2024 di angka 61,54. Ini juga termasuk kategori rentan.

"Saya harap disemester dua nanti, minimal Kutim tidak dibawah Kabupaten lainnya, harus ketengah atau bisa keatas. Ini kesempatan dan waktu yang tepat untuk memperbaiki MSCP Kutim," harap Andy.

Sekretaris Daerah Kutim Rizali Hadi menyampaikan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance harus diwujudkan secara nyata. Pemkab Kutim terus berupaya melakukan pembenahan secara konsisten dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi digital dalam sistem pemerintahan.

"Penguatan pengawasan internal juga menjadi kunci penting. Peran Inspektorat harus semakin dioptimalkan sebagai early warning system dalam mendeteksi potensi risiko, sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas dan disiplin aparatur sipil negara. Integritas bukan hanya tuntutan, tetapi harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Dirinya berharap koordinasi ini bisa wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat segera di implementasikan dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, khususnya dalam tata kelola pemerintahan di Kutim

"Terus perkuat komitmen, tingkatkan kinerja, serta menjaga amanah yang telah diberikan, demi terwujudnya Pemkab Kutim yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkas Rizali.



DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Sumber Foto : Dinas Pariwisata Kutai Timur



Festival Lomplai 2026 Capai Puncak, Tradisi Dayak Wehea Kian Mendunia

Wahau - 22 April 2026

Festival Lomplai memasuki puncaknya yang berlangsung meriah dan mampu menyedot ribuan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang sengaja hadir pada kegiatan tahunan yang di gelar oleh masyarakat Dayak Wehea di Kecamatan Muara Wahau. Tepatnya di Desa Nehes Liah Bing.

Kegiatan yang menjadi rangkaian menyambut pesta panen ini sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan penuh tepatnya dimulai sejak tanggal 23 Maret lalu juga dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh warga yang ada. Tidak hanya sekedar festival. Kegiatan ini juga menjadi simbol dari upaya pelestarian budaya spiritual nenek moyang yang akan terus dijaga ditengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Berbagai kegiatan spritual seperti Ngesea Egung, Laq Pesyai, Nak Pesyai Dug Min, Nak Pesyai Wet Min, Nag Jengea, Embob Jengea, hingga Ngeldung menjadi rangkaian yang tak terpisahkan dan memiliki makna dan pesan yang cukup dalam setiap perjalanan hidup yang dikemaa sedemikian rupa untuk bisa disaksikan oleh masyarakat secara langsung.

Dimulai dari pawai budaya dan tradisi menjamu, lalu dilanjutkan dengan Tiaq Diag Jengea yang menghadirkan perang air (Seksiang), tarian rakit, hingga lomba perahu.

Kemudian dilanjutkan dengan ritual Embos Min, Bea Mai Min, dan ditutup dengan Ritual Hudoq sebagai ungkapan syukur kepada leluhur.

Kegiatan yang tahun ini mengusung tema "Menenun Rasa Syukur Tak Terhingga di Atas Tanah Leluhur Wehea" Ini juga terasa spesial. Karena turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi yang datang dengan semangat tinggi dan menjadi bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelestarian budaya lokal agar terus berkembang di masyarakat.

Festival Lomplai sendiri merupakan upacara ritual yang dilakukan oleh suku Dayak Wehea Kalimantan Timur. Upacara ritual ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat suku Dayak Wehea setelah melakukan panen padi.

Selain itu, Festival ini juga sudah resmi masuk dalam agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026 oleh Kemenparekraf. Kegiatan ini juga menjadi salah satu event unggulan nasional yang menonjolkan tradisi, kearifan lokal, dan ekonomi kreatif.

Hadirnya festival ini tidak hanya berperan dalam melestarikan budaya, tetapi juga memberikan efek domino terhadap perkembangan ekonomi lokal. Berbagai pelaku UMKM.



Sakral dan Mendunia, Festival Lom Plai Jadi Kebanggaan Dayak Wehea

Wahau - 22 April 2026

Pesta Adat dan Budaya Wehea Lom Plai berlangsung meriah di Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rabu (22/04/2026).

Perayaan yang menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh warga Dayak Wehea ini sudah berlangsung selama 1 bulan penuh dengan berbagai kegiatan ini tidak hanya mampu menarik perhatian wisatawan lokal Namun juga sudah menjadi perhatian hingga wisatawan mancanegara.

Selain itu, Festival yang sudah berlangsung selama ribuan tahun ini juga tak luput dari pantauan berbagai media baik lokal, nasional maupun mancanegara yang seakan tidak mau ketinggalan mengabadikan berbagai momen spesial yang hanya bisa disaksikan setahun sekali ini.

Tidak sampai disitu, Wakil Bupati Mahyunadi juga turut hadir pada Festival yang tahun ini mengusung tema Menenun Rasa Syukur Tak Terhingga di Atas Tanah Leluhur Wehea". Kehadiran orang nomor dua di Kutim ini juga menjadi bukti komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga budaya lokal agar terus lestari..

"Melalui perayaan Lom Plai ini, kita tunjukkan bahwa kekayaan budaya kita adalah daya tarik utama yang tidak dimiliki daerah lain"

H. Mahyunadi, SE., M.Si.
Wakil Bupati Kutai Timur

Wabup Mahyunadi, mengatakan bahwa kehadiran perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi merupakan suntikan semangat bagi masyarakat Kutai Timur untuk terus melestarikan adat istiadat dan budaya warisan leluhur.

Dirinya juga menekankan bahwa Lom Plai bukan sekadar seremonial, melainkan aset wisata yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Oleh karena hal tersebut ia merasa bangga, karena tradisi yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat Wehea kini mendapat pengakuan nasional.

Orang nomor dua di Pemkab Kutim itu mengaku akan terus berkomitmen dan berupaya membenahi infrastruktur pendukung agar para wisatawan yang datang merasa nyaman.





Erau Kutai Siap Digelar di Kutim Tahun Ini, Bupati Ardiansyah Tegaskan Komitmen Pelestarian Budaya

Sangatta - 22 April 2026

Bupati Ardiansyah Sulaiman memastikan bahwa tahun ini Kabupaten Kutai Timur akan melaksanakan Erau Kutai yang menjadi bagian dari tradisi warga asli Kalimantan Timur yakni Kutai yang di lakukan setiap tahun, di isi dengan berbagai kegiatan seperti ritual adat, seni, dan budaya.

"Setelah dikukuhkannya Pemangku Adat (Kutai) dan rumah adat di Kutai Timur, Maka sesuai dengan janji saya dengan ayahanda (Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura). Maka Insya Allah dengan segenap kemampuan kita akan mulai (Erau)," ujar Bupati Ardiansyah pada kegiatan pengukuhan Pemangku Adat Kutai Kutim yang berlangsung di Rumah Adat Kutai jalan Ring Road, Sangatta, Rabu (22/04/2026).

Di hadapan Sultan Aji Muhammad Arifin beserta Permaisuri, Bupati Ardiansyah mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Erau nantinya akan di sesuaikan. Apakah bersamaan dengan Hari jadi Kabupaten yang akan berlangsung Oktober mendatang atau dilaksanakan agenda tersendiri. Namun dirinya memastikan bahwa nantinya Erau akan di isi dengan berbagai kegiatan adat dan budaya.

"Apakah Pelas Tanah, Pelas Pijak Tanah, Pelas Laut dan berbagai kegiatan seni dan Budaya Kutai. Termasuk festival olahraga tradisional yang mudah-mudahan mampu memberikan Apakah Pelas Tanah, Pelas Pijak Tanah, Pelas Laut, serta berbagai kegiatan seni dan budaya Kutai, termasuk festival olahraga tradisional, yang mudah-mudahan mampu memberikan dampak positif bagi pelestarian budaya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat."ucap Bupati.



Ia menambahkan, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga mampu memperkuat identitas budaya daerah serta meningkatkan partisipasi generasi penerus dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Kutai. dirinya berharap seluruh pihak dapat ikut mendukung agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dukungan dari berbagai elemen, baik pemerintah, swasta, pelaku seni budaya, hingga masyarakat, dinilai sangat penting guna memastikan keberlangsungan tradisi serta memperkuat citra daerah sebagai salah satu pusat kebudayaan yang kaya akan nilai-nilai luhur





Pengukuhan Adat Kutai di Kutim, Komitmen Jaga Budaya di Tengah Arus Modernisasi

Sangatta - 22 April 2026

Penyerahan Sabda Pandita Ratu dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Sultan Aji Muhammad Arifin serta pengukuhan Pengurus Pemangku Adat Istiadat Kutai oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman berlangsung khidmat di Rumah Adat Kutai, Jalan Ring Road RT 66, Sangatta, Rabu (22/04/2026).

Kegiatan ini tidak sekedar menjadi seremoni, melainkan momentum penting dalam peran memperkuat adat Kutai di Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Selain itu, Pengukuhan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pelestarian adat istiadat dan budaya leluhur yang dilakukan bersama antara Kesultanan Kutai, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bertujuan sebagai fondasi utama dalam menjaga kelangsungan budaya Kutai di tengah arus modernisasi.

Pengukuhan pengurus adat Kutai di Kutai Timur dilakukan secara resmi dengan tujuan memperkuat struktur kelembagaan adat serta memastikan kesinambungan budaya lintas generasi. Para pemangku adat diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pengayom masyarakat sekaligus penjaga nilai-nilai budaya lokal.

Dalam amanatnya, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Adji Muhammad Arifin yang dibacakan oleh Pangeran Notonegoro menekankan pentingnya menjaga adat, adab, dan budaya Kutai sebagai warisan luhur, modernisasi tidak boleh mengikis akar budaya, karena adat merupakan jati diri masyarakat Kutai.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa rumah adat memiliki peran strategis sebagai simbol persatuan dan pusat pelestarian budaya, yang berlandaskan nilai-nilai utama Kesultanan Kutai, yakni adat, adab, budaya, dan syarak (agama).

"Sabda Pandita Ratu tersebut menjadi pedoman moral bagi para pemangku adat dalam menjalankannya di tengah dinamika zaman," demikian

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan bahwa adat istiadat bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang dihilangkan pada nilai-nilai luhur.

"Di tengah arus globalisasi yang begitu cepat, adat hadir sebagai penyeimbang yang menjaga jati diri, memperkuat karakter, serta memimpin arah pembangunan agar tetap berlandaskan kearifan lokal," ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa pengukuhan pengurus adat tidak hanya bersifat administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen.

"Para pemangku adat diharapkan mampu menjadi penjaga nilai-nilai adat, pelindung tradisi, serta perekat persatuan di tengah masyarakat. Mereka juga memiliki peran strategis dalam menyelesaikan permasalahan sosial secara arif dan bijaksana berdasarkan kearifan lokal," tambahnya.





Rakor Diskominfo Kaltim Dorong Integrasi Sistem dan Kolaborasi Digital Antar Daerah

Samarinda - 23 April 2026

Tantangan digital saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing daerah. Diperlukan keterhubungan, kolaborasi, serta semangat berbagi inovasi untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong percepatan transformasi digital dengan memperkuat kolaborasi antar daerah serta integrasi sistem layanan.

Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian kabupaten/kota se-Kaltim yang diikuti sekitar 200 peserta. Peserta berasal dari perwakilan kabupaten/kota, Perangkat Daerah (PD) lingkup provinsi, hingga stakeholder dan instansi vertikal.

Tingginya jumlah peserta menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sektor komunikasi dan informatika di daerah.

Rakor Diskominfo sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara bergiliran di berbagai daerah. Setelah sebelumnya digelar di Tenggarong, Berau, Bontang, dan Balikpapan, kali ini Kota Samarinda menjadi tuan rumah.

Kegiatan diawali dengan welcome dinner yang berlangsung di Arutalla Ballroom, Gedung B Lantai 4 Bapperida Kota Samarinda, Rabu (22/4/2026), dan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi pada hari berikutnya.

"Transformasi digital itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi bagaimana kita bisa maju bersama. Ketika satu daerah punya sistem yang sudah berjalan baik, itu bisa dimanfaatkan oleh daerah lain," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil peran sebagai penghubung antar daerah, khususnya dalam menyatukan berbagai sistem yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Integrasi ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem data yang lebih terstruktur, terbuka, dan mudah diakses untuk kepentingan pembangunan.

Melalui pendekatan tersebut, pertukaran data menjadi lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. Masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Selama dua hari pelaksanaan, rakor akan diisi dengan sejumlah agenda penting. Paparan materi mengenai integrasi sistem dan pengelolaan data menjadi fokus utama pada sesi awal, sebagai landasan menyamakan persepsi terkait arah kebijakan digital di daerah.

Selanjutnya, forum diskusi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi ruang untuk menyelaraskan program kerja. Melalui forum ini, setiap daerah dapat mengidentifikasi potensi kolaborasi sekaligus menghindari tumpang tindih program.





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Polarisasi, Berakhlak Komitmen
Berakhlak Berprestasi

Perkuat Integrasi Digital, Rakor Kominfo Se-Kaltim 2026 Fokus Sinkronisasi Data dan Layanan Publik

Samarinda - 23 April 2026

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur Tahun 2026 resmi digelar di Samarinda, Kamis (23/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure, Ruang Crystal 1, Samarinda dan mengusung tema Integrasi Layanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur."

ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, ditandai dengan pemukulan gong, disaksikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal.

Rakorda ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat sinergi, serta merumuskan arah kebijakan dalam mewujudkan integrasi layanan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kegiatan diawali dengan penampilan tarian Nusantara yang menambah semarak suasana pembukaan.

Dalam sambutannya, Sekda Kaltim Sri Wahyuni menekankan lima poin penting yang menjadi fokus pembahasan dalam rakor tersebut. Pertama, penguatan integrasi data dan sistem informasi. Ia menegaskan bahwa data harus menjadi satu sumber kebenaran (single source of truth) yang dapat diakses secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah.

Kedua, peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, di mana layanan harus mudah diakses, responsif, serta memberikan kepastian bagi masyarakat.

Ketiga, penguatan keamanan informasi dan persandian. Menurutnya, di tengah meningkatnya ancaman siber, perlindungan data dan sistem menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.

Keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang ini dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis.

Kelima, penguatan kolaborasi antar daerah. Integrasi, lanjutnya, tidak akan terwujud tanpa komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Perempuan yang diketahui Peraih Peringkat I ADLG Awards 2025 & ASKOMPSI Digital Leadership ini juga menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui integrasi sistem dan data lintas pemerintahan, diharapkan terwujud tata kelola yang terhubung, efisien, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel.

"Saya berharap melalui rakor ini akan lahir kesepakatan, komitmen, dan langkah nyata dalam memperkuat integrasi layanan pemerintahan di Kalimantan Timur," ujarnya.





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

BerAKHLAK
Bangsa Melayu
BerAKHLAK

PENTILAKHIAN Hak Kekayaan Indikasi Geografis PISANG KEPOK KUTIM

Dari Lokal ke Global, Pisang Kepok Kutim Resmi Berstatus Indikasi Geografis

Sangatta - 23 April 2026

Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi memiliki sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk komoditas Pisang Kepok. Bupati Ardiansyah Sulaiman secara simbolis menerima sertifikat tersebut dari perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (Kaltim).

Atas pencapaian tersebut, menjadi bukti komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, dengan memberikan kepastian hukum untuk komoditi lokal yang saat ini menjadi buah bibir di pasar global.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan langkah strategis, salah satunya dengan memperluas jangkauan pasar. Dirinya menyebutkan bahwa potensi ekspor pisang Kutim masih sangat terbuka. Hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah ekspor setiap tahunnya.

Kutim sendiri menurut orang nomor satu di Kutim ini, adalah wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian. Selain itu, dirinya juga menyebut, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan lahan baru untuk mendukung pengembangan tanaman yang memiliki nama latin *Musa acuminata balbiana Colla* ini.

"Pisang kepok di Indonesia memang banyak, tapi yang terbaik ada di Kutim tepatnya di Kaliorang. Sertifikat ini sebagai bukti bahwa pisang kita benar-benar berkualitas bagus," ujar Bupati Ardiansyah di hadapan Kepala Divisi KeKemenkumham Hanton. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Noviani Noor dan Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum serta undangan lainnya.

Pria kelahiran 05 Februari 1964 itu mengaku, keterlibatan pihak Kementerian dan pihak Jasindo serta Kelompok Tani sangat berpengaruh dalam mengawal proses dalam meraih legalitas tersebut. Namun Dirinya mengingatkan bahwa sertifikat ini adalah milik seluruh masyarakat Kutim yang harus dijaga bersama.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim Hanton, mengungkapkan pencapaian ini merupakan awal dari tanggung jawab besar dalam menjaga konsistensi produk. Ia menekankan pentingnya hilirisasi dan pengawasan berkelanjutan agar standar yang telah ditetapkan tidak menurun di masa mendatang.

Adapun sertifikasi MPIG atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis ini mencakup tiga hal utama, yakni reputasi, kualitas dan ciri khas ke-daerahan, Pihaknya akan terus memantau setiap tahun agar kualitasnya tidak berubah.



PKK Kutim Perkuat Peran Kader Lewat Pelatihan Administrasi Terpadu

Sangatta - 23 April 2026

Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar pelatihan administrasi bagi kader PKK se-Kabupaten yang berlangsung di Gedung Wanita Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (23/04/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 180 peserta yang berasal dari TP PKK di 18 kecamatan. Pelatihan administrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam pengelolaan administrasi organisasi, sekaligus menyamakan persepsi antara PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Ketua TP PKK Kutai Timur, Ny. Siti Robiah Ardiansyah, menegaskan pentingnya keseragaman pemahaman dalam menjalankan program PKK. Ia juga menekankan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat.

"Tujuan utama kita adalah memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran, mulai dari ketua PKK kecamatan, sekretaris, hingga kelompok kerja (pokja), harus memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar," tegasnya.

Menurutnya, tertib administrasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja TP PKK, dengan melalui administrasi yang baik, data masyarakat dapat tercatat secara akurat.

"Dengan demikian, kita dapat memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, istri dari orang nomor satu di Kutim itu juga menyoroti pentingnya peran PKK dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Dirinya juga mendorong terciptanya rumah tangga yang sehat, serta membentuk keluarga yang kuat.

"Pengasuhan anak juga harus dilandasi dengan kasih sayang agar tumbuh menjadi generasi yang berkualitas," tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga ia mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat serta membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Di akhir sambutannya Ketua TP PKK Kutim juga mendorong pembentukan Dasa Wisma di seluruh wilayah Kutim yang belum terbentuk.

"Bagi Dasa Wisma yang belum terbentuk, segera dibentuk dan aktifkan kegiatannya sebagai ujung tombak dalam pendataan dan pemberdayaan masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, pelatihan yang turut dihadiri oleh para Camat se Kabupaten ini akan dilaksanakan selama satu hari efektif ini dibagi ke dalam lima lokasi berbeda. Dimana Ketua PKK dan sekretaris kecamatan mengikuti kegiatan di Gedung Wanita Bukit Pelangi, Pokja I di Ruang Rapat Kesbangpol, Pokja II di Ruang Rapat Diskominfo Staper, Pokja III di Ruang Rapat TP PKK Kabupaten, serta Pokja IV di Aula Dinas Kesehatan.





Kutai Timur Tuan Rumah Rakorda Kominfo Kaltim 2027, Siap Perkuat Integrasi Digital

Samarinda - 23 April 2026

Kabupaten Kutai Timur resmi ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur tahun 2027. Keputusan ini menjadi salah satu poin penting dalam rumusan hasil Rakorda 2026 yang berlangsung di Hotel Mercure, Ruang Crystal 1 Samarinda, Kamis (23/04/2026).

Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur terhadap Kabupaten yang akan segera berusia ke 27 ini dalam mengawal percepatan transformasi digital dan integrasi layanan pemerintahan.

Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur, Ronny Bonar H. Siburian, menyambut positif mandat tersebut. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk menyukseskan agenda tahunan itu dengan persiapan yang matang.

"Penunjukan Kutai Timur adalah amanah besar. Kami siap menyelenggarakan itu (Rakorda) secara maksimal, baik dari sisi kesiapan teknis, sarana prasarana, maupun substansi kegiatan," ujar Ronny.

Ia menambahkan, momentum ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi di Kalimantan Timur.

"Dengan ditetapkannya Kutai Timur sebagai tuan rumah, tahun depan, dapat berjalan sukses sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi," tambahnya.

Dalam Rakorda 2026 tersebut, juga dihasilkan sejumlah rumusan strategis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal, bersama perwakilan 10 kabupaten/kota.

Pada rumusan pertama, disepakati 20 poin strategis, di antaranya penguatan integrasi data sebagai satu sumber kebenaran (single source of truth), peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, penguatan keamanan informasi dan persandian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, juga ditekankan pentingnya kolaborasi antar daerah, dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik, penyediaan internet desa gratis, hingga dorongan pengembangan platform kecerdasan buatan (AI) di setiap pemerintah daerah.

Kedua, menyatakan bahwa hasil kesepakatan tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam mencapai tujuan organisasi di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian se-Kalimantan Timur.

Sementara pada rumusan ketiga, secara resmi ditetapkan bahwa pelaksanaan Rakorda tahun 2027 akan digelar di Kabupaten Kutai Timur.

Dengan keputusan ini, Kutai Timur diharapkan mampu menjadi tuan rumah yang tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu mendorong percepatan transformasi digital di Kalimantan Timur secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.



**DISKOMINFO
STAPER KUTIM**

Kutai Timur Dalam Sepekan

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berakhlaklah Pelayan Masyarakat
Berakhlaklah Pelayan Masyarakat

Perkuat Informasi Desa, Sosialisasi KIM Digelar di Muara Wahau

Wahau - 23 April 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim) gelar Sosialisasi pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Aula Kantor Kecamatan Muara Wahau pada Kamis (23/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung satu hari penuh ini bertujuan untuk memberikan landasan teknis bagi aparatur kecamatan dan desa dalam membangun kemandirian pengelolaan informasi di tingkat lokal.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Aji Nazaruddin menjelaskan bahwa kehadiran timnya di wilayah tersebut merespon dengan baik karena belum adanya struktur KIM yang terbentuk di Kecamatan Muara Wahau. Selain itu, ia menegaskan, pembentukan KIM ini sangat krusial sebagai wadah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi hingga lapisan masyarakat yang paling bawah.

"KIM untuk di Kecamatan Muara Wahau belum ada, semoga ke depannya bisa diadakan sosialisasi yang lebih besar lagi dan bisa dibentuk KIM di tiap desa," ujarnya.

Secara teknis fungsi KIM sendiri merupakan sebuah wadah yang bisa dimanfaatkan dan memiliki peran strategis dalam membantu menyebarkan program pembangunan daerah.

KIM sendiri, menurut Aji biasa ia disapa memiliki fleksibilitas karena dikelola langsung oleh masyarakat, sehingga informasi yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan warga setempat. Selain itu, ia menekankan pentingnya legalitas kelompok melalui Surat Keputusan (SK) agar pemerintah dapat memberikan fasilitas pendukung. Salah satunya laman website yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan luaskan informasi termasuk sarana promosi potensi lokal.

Selain itu, keberadaan KIM juga menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, baik dalam menyampaikan kebijakan maupun menyerap aspirasi warga secara cepat dan tepat. Dengan pendekatan partisipatif ini, KIM diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi informasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDK) Kecamatan Muara Wahau, Erni, menyambut baik hadirnya KIM yang menurutnya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Diantaranya dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal melalui publikasi dan promosi produk-produk unggulan desa. Untuk itu, dirinya menyebut akan segera menindaklanjuti hasil sosialisasi ini agar struktur KIM di wilayah Muara Wahau dapat segera dibentuk.

"Kami sangat mendukung sekali karena dengan adanya KIM di Kecamatan Muara Wahau, semua informasi positif bisa disampaikan ke masyarakat luas, serta membantu menangkalkan berita hoaks," pungkasnya.



Penanggung Jawab :

Kepala Dinas Kominfo Staper
Ronny Bonar H. Siburian, SE., M.A.P.

Pimpinan Umum :

Kabid IKP & Kehumasan
Aji Nazaruddin, S.H., M.M.

Pengarah :

M. Lalu Joni Aswadi

Pempinan Redaksi :

Arie Firdaus
Wak Hedir
Wahyu Yuli artanto

Anggota Redaksi :

Wiryadi Tamrin
Maulana
Fiqri
Irhan



kominfo.kutim



Selengkapnya

Kutaitimurkab.go.id